

AKUNTANSI PIUTANG REKENING LISTRIK PADA
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II SUMUT
CABANG MEDAN

Oleh :

IRMA SYAFRIANI

NPM : 968300230



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2002

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24



AKUNTANSI PIUTANG REKENING LISTRIK PADA

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II SUMUT

CABANG MEDAN

Oleh :

IRMA SYAFRIANI

NPM : 968300230



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2002

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/4/24

**AKUNTANSI PIUTANG REKENING LISTRIK PADA
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II SUMUT
CABANG MEDAN**



SKRIPSI

Oleh :
IRMA SYAFRIANI
NPM : 968300230

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Medan Area**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2002**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : AKUNTANSI PIUTANG REKENING LISTRIK PADA
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II SUMUT
CABANG MEDAN

Nama Mahasiswa : IRMA SYAFRIANI

No. Stambuk : 968300230

Jurusan : AKUNTANSI

Tanggal Lulus : 26 OKTOBER 2002



Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H. ARIFIN LUBIS, MM,Ak)

(Drs. ALI USMAN SIREGAR)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Drs. ZAINAL ABIDIN)

(H. SYAFRIANDY, SE, Msi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

RINGKASAN

IRMA SYAFRIANI, AKUNTANSI PIUTANG REKENING LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II SUMUT CABANG MEDAN, (Dibawah bimbingan Drs. H. Arifin Iubis, MM Sebagai Pembimbing I dan Drs. Ali Usman Siregar Sebagai Pembimbing II).

Dilandaskan atas tekad dan keyakinan bangsa Indonesia memasuki abad 21 dan untuk berkiprah sebagai suatu kekuatan negara industri baru di kancah ekonomi internasional menjadikan kebutuhan akan energi listrik di era globalisasi ini semakin meningkat. Dengan pertumbuhan laju penduduk dan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, telah menimbulkan dampak terhadap peningkatan konsumsi listrik masyarakat.

Dengan meningkatnya jumlah permintaan secara terus menerus mengakibatkan semakin banyak dan rumitnya transaksi yang terjadi. Pencatatan transaksi yang begitu banyak dan beraneka ragam merupakan suatu alasan yang mengharuskan perusahaan mempunyai alat untuk mencatat transaksi yang terjadi. Alat tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kepada pimpinan dalam rangka mengelola perusahaan. Dalam hal ini akuntansi adalah salah satu alat yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan. Melalui akuntansi, pimpinan dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatan perusahaan baik kepada pihak intern maupun ekstern perusahaan.

PT. PLN (Persero) Wilayah II SUMUT Cabang Medan menyediakan listrik dan menjualnya kepada masyarakat secara kredit, yaitu langganan terlebih dahulu memakai listrik kemudian pembayarannya ditagih pada periode setelah

pemakaiannya. Dalam hal ini batas waktu pemakaian kurang dari tigapuluh hari. Sistem penjualan seperti ini menimbulkan perkiraan piutang bagi perusahaan yang pada akhirnya menuntut perusahaan untuk mengadakan suatu sistem pencatatan piutang yang tepat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan, ditemukan adanya masalah dibidang pencatatan piutang yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

“Perusahaan tidak menyajikan taksiran umur piutang sekaligus persentase dari penyisihan piutang ragu-ragu dan membuat jurnal penyesuaian untuk taksiran piutang ragu-ragu dan piutang tidak dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi menurut Standar Akuntansi Keuangan.”

Berdasarkan analisis dan evaluasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan membuat pengelompokan piutang menjadi tiga golongan yaitu:

- Piutang dagang.
- Piutang karyawan.
- Piutang bunga (denda).

2. setiap akhir bulan perusahaan secara rutin membuat laporan piutang listrik untuk mengetahui dan memantau piutang yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, namun perusahaan menjadikan piutang ragu-ragu berdasarkan piutang yang telah jatuh tempo (tunggal) tiga bulan dan lebih. Walaupun secara keseluruhan dinilai baik, akan tetapi akuntansi piutang pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan masih terdapat beberapa kelemahan yaitu penilaian piutang dalam hal penaksiran piutang dagang ragu-

ragu memakai metode langsung dari nilai rekening listrik yang ditunggak oleh pelanggan.

3. Dalam menentukan nilai penyisihan piutang ragu-ragu perusahaan mengambil dari persentase piutang yang tidak tertagih dimasa yang lalu.
4. Penyajian piutang pada neraca sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum yaitu jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Adapun judul skripsi ini adalah : “ AKUNTANSI REKENING LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH II SUMUT CABANG MEDAN.” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna . Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Syahriandy, SE, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Zainal Abidin selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, MM, sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ali Usman suregar, sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar dan fungsionaris akademis Fakultas Ekonomi

Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

6. Bapak pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan data untuk penulisan skripsi ini.
 7. Ayahanda Hanif dan Almarhumah Ibunda Hamisah Anum serta Abang dan kakak, Adik dan Keponakanku : Ir. Syaiful Bahri dan Evi Ranti, Iong Evi, Laila, Asrul Sani SE, Juli, Dede, Zulfa, Iyul, Maya, Rani, dan Ryan yang selama ini telah mengasuh, membimbing dan memberi bantuan moril dan materil kepada penulis.
 8. Teman – teman terdekat : Edy Dharma, Mangantar, Roma, Wije, Dharma, Saut, Meivi, Tio, Lyna dan Royjon.
 9. Seluruh rekan-rekan kamfusi yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Akhirnya penulis berharap, agar skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya kepada penulis sendiri.

Medan, 2002

(IRMA SYAFRIANI)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Hipotesis	3
D. Luas dan Tujuan Penelitian	4
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	5
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian Piutang	6
B. Klasifikasi Piutang	8
C. Metode Pencatatan Piutang	12
D. Penilaian Piutang	19
E. Penyajian Piutang	29

	Halaman
BAB III : PT. PLN (Persero) WILAYAH II SUMUT CAB. MEDAN	31
A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Perusahaan	31
B. Klasifikasi Piutang	49
C. Metode Pencatatan dan Prosedur Piutang	51
D. Penilaian Piutang	59
E. Penyajian Piutang	61
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	63
A. Penilaian Piutang	63
B. Pencatatan Piutang	66
C. Penyajian Piutang	67
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Buku Penjualan PT. Julianto Per 31 Desember 1999	17
Tabel 2 Buku Penerimaan Kas PT. Julianto Per 31 Desember 1999	18
Tabel 3 Buku Piutang Dagang PT. Julianto Per 31 Desember 1999	18
Tabel 4 Daftar Perincian Piutang Dagang PT. Julianto Per 31 Des 1999	19
Tabel 5 Daftar Umur Piutang PT. Julianto Per 31 Des 1997	26
Tabel 6 Takstran Piutang Tak Tertagih PT. Julianto Per 31 Des 1997	27
Tabel 7 Neraca PT. Julianto Per 31 Desember 1999	31
Tabel 8 Piutang Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan Periode 31 Oktober 2001	55
Tabel 9 Piutang Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan Periode 31 Nopember 2001	56
Tabel 10 Piutang Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan Periode 31 Desember 2001	57
Tabel 11 Laporan Piutang Langgan Berdasarkan Umur Per 31 Desember 2001	60
Tabel 12 Neraca PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan Per 31 Desember 2001 Dan 2002	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Klasifikasi Piutang	11
Gamba 2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dilandaskan atas tekad dan keyakinan bangsa Indonesia memasuki abad 21 dan untuk berkiprah sebagai suatu kekuatan negara industri baru di kancan ekonomi internasional menjadikan kebutuhan akan energi listrik di era globalisasi dewasa ini akan terus semakin meningkat. Dengan pertumbuhan laju penduduk dan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, telah menimbulkan dampak terhadap peningkatan konsumsi listrik masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini listrik sudah merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindarkan guna menunjang aktivitas kehidupan masyarakat.

Dengan meningkatnya jumlah permintaan secara terus menerus mengakibatkan semakin banyak dan rumitnya transaksi yang terjadi. Pencatatan transaksi yang begitu banyak dan beraneka ragam merupakan suatu alasan yang mengharuskan perusahaan mempunyai alat untuk mencatat transaksi yang terjadi. Alat tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kepada pimpinan dalam rangka mengelola perusahaan. Dalam hal ini akuntansi adalah salah satu alat yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan. Melalui akuntansi, pimpinan dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan perusahaan baik kepada pihak intern maupun eksteren perusahaan.

PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan menyediakan listrik dan menjual kepada masyarakat secara kredit, yaitu langganan terlebih dahulu memakai listrik kemudian pembayarannya ditagih pada periode setelah pemakaiannya. Dalam hal ini batas waktu pemakaian kurang lebih tigapuluh hari. Sistem penjualan seperti ini menimbulkan perkiraan piutang bagi perusahaan yang pada akhirnya menuntut perusahaan untuk mengadakan suatu sistem pencatatan piutang yang tepat.

Perubahan status Badan Usaha PLN dari Perum jadi Persero, lebih ditekankan pada fungsi mengusahakan keuntungan dengan sasaran seperti tertera pada item ketiga tersebut, meliputi : menejemen bahan bakar, penekanan susut jaringan, menejemen material dan akuntansi keuangan.

Jadi dalam peningkatan efisiensinya, PT. PLN (Persero) memperhatikan dari dua aspek, yaitu : aspek teknik dan aspek ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini, hanya mencermati dari aspek ekonomi mengenai akuntansi keuangan yaitu mengenai pencatatan, penilaian dan penyajian piutang, khususnya piutang rekening listrik yang menjadi usaha pokok dari PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut cabang Medan.

Berdasarkan ilustrasi di atas, akan dicoba untuk membahas akuntansi keuangan dengan konsentrasi pada piutang, karena dari judul tersebut dapat diketahui gambaran tentang isi skripsi yang disajikan. Demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini, yang menyajikan judul, yaitu :

Akuntansi Piutang Rekening Listrik pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/4/24

B. Perumusan Masalah

Perusahaan Listrik Negara adalah suatu badan usaha milik negara yang bertujuan mengadakan dan melaksanakan sumber energi listrik yang diperuntukkan kepada masyarakat luas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan ini dihadapkan kepada masalah memperhatikan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah diberlakukan sehingga diperlukan pemecahan agar kelangsungan operasi dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Setelah melakukan penelitian pendahuluan pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

“Piutang yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

C. Hipotesis

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu soal yang dimaksudkan sebagai tuntunan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya.

Adapun hipotesis penulis yaitu :

- a) Perusahaan tidak menyajikan taksiran umur piutang sekaligus persentase dari penyisihan piutang ragu-ragu dan membuat jurnal penyesuaian untuk taksiran piutang ragu-ragu.
- b) Piutang tidak dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi menurut Standar Akuntansi

Keuangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

D. Luas dan Tujuan Penelitian

Seperti diketahui bahwa piutang terbagi atas dua, yaitu piutang dagang dan piutang non dagang. Sumber utama piutang adalah aktivitas normal perusahaan, yakni penjualan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang non dagang meliputi seluruh tipe piutang lainnya. Piutang non dagang timbul dari berbagai transaksi seperti penjualan sekuritas atau harta benda lain selain persediaan. Dalam penyusunan skripsi ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan piutang dagang yaitu rekening listrik pada PT. PLN (Persero) wilayah II Sumut Cabang Medan.

Selain itu untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, secara ringkas dapat dijelaskan disini bahwa tujuan dalam melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan adalah :

1. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan terutama dalam hal akuntansi piutang.
2. Mengetahui sejauh mana PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan menerapkan kebijakan akuntansi piutang dalam meningkatkan laba.
3. Menarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran untuk mengatasi masalah yang dihadapi PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan dalam usaha penanggulangan akuntansi piutang.

E. Metode Penelitian dan Teknik pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data atas penelitian ini dilakukan melalui dua penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku seperti : buku-buku teks, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Hasil yang diperoleh tersebut disebut data sekunder.

2. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dan yang bersumber pada objek penelitian guna mendapat data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pejabat yang berwenang memberikan data dan informasi yang diperlukan.
3. Daftar pertanyaan, yaitu membuat daftar pertanyaan dan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berkompeten, selanjutnya jawaban yang akan diperoleh secara tertulis pula.

F. Metode Analisis

Untuk melakukan analisis dari penelitian ini, maka penulis menggunakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

metode analisis sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

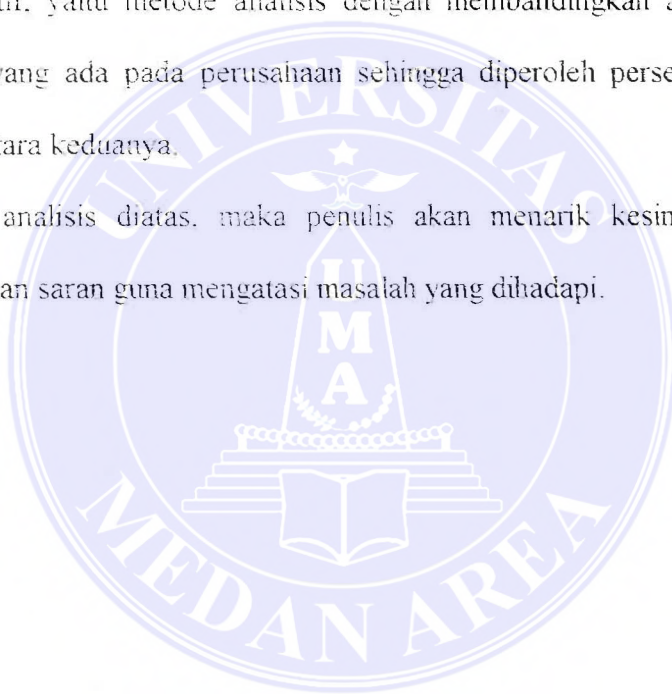
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id) 4/4/24

Document Accepted 4/4/24

1. Metode deskriptif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data dan selanjutnya menginterpretasikannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Metode komparatif, yaitu metode analisis dengan membandingkan antara teori dengan praktek yang ada pada perusahaan sehingga diperoleh persesuaian dan penyimpangan antara keduanya.

Dari hasil analisis diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran guna mengatasi masalah yang dihadapi.



BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian Piutang.

Piutang (Receivable) merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam aktivitas ekonomi dari suatu perusahaan, hal ini akibat karena piutang memiliki likuiditas nomor dua setelah kas di dalam aktiva lancar. Piutang timbul dari berbagai jenis transaksi, dimana yang paling umum adalah dari penjualan barang ataupun jasa secara kredit. Dalam hal ini piutang meliputi semua tagihan dalam bentuk uang terhadap perorangan, badan usaha atau pihak tertagih lainnya.

Untuk mengenal piutang lebih jauh, dapat dilihat beberapa definisi piutang yang diutarakan para pakar yang mempelajari konsep piutang ini. Setiap pakar memberika definisi yang berbeda tergantung dari sudut pandangnya, walaupun demikian umumnya definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama. Oleh karena itu piutang tidak memiliki definisi yang baku. Berikut ini dikutip beberapa defenisi yang ada.

Dalam pengertian yang luas pengertian piutang menurut Smith & Skousen sebagai berikut :

"Dalam arti luas, istilah piutang dapat digunakan bagi semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa. Namun, untuk tujuan akuntansi

istilah ini pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas. 1)

Menurut Fess dan Niswonger, pengertian piutang adalah sebagai berikut :

"Istilah piutang meliputi semua tagihan dalam bentuk uang terhadap perorangan, badan usaha atau pihak tertagih lainnya. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, dimana yang paling umum adalah dari penjualan barang atau jasa secara

kredit. 2)

Dari kedua definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa sebenarnya piutang adalah merupakan hak (klaim) yang diharapkan dapat tertagih dari orang lain atau badan lain dalam bentuk kas.

Penagihan piutang yang kita lakukan kepada orang lain atau perusahaan lain biasanya terjadi karena penjualan barang atau pemberian jasa yang dilakukan secara kredit, namun akibatnya transaksi - transaksi lain digolongkan dalam piutang lain-lain.

1) Jay M Smith and K Fred Skousen, Intermediate Accounting, Comprehensive Volume 9th Edition, Alih Bahasa Tim Penerjemah Penerbit Erlangga, Volume Komprehensif, Jilid satu, Edisi Kesembilan, Cetakan Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1995 hal 286

2) Philip E. Fess, C. Rollin Niswonger and Carl S. Warren, Accounting Principles, 16th Edition, Terjemahan Hyginus Kuswinarno, Herman Wibowo, Jilid Satu, Edisi Enam Belas, Cetakan Kesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta 1997 hal 352

Sedangkan Soemarso S.R, memberikan definisi piutang sebagai berikut :

" Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada langganan-langgananya pada waktu melakukan penjualan 3)

Oleh karena itu piutang secara luas dapat diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya. Sedangkan secara sempit dan untuk tujuan manajemen keuangan, piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diteimanya uang dimasa yang akan datang. Untuk pengertian piutang dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan pengertian dalam arti yang sempit.

Piutang dapat juga timbul ketika perusahaan telah memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel, melakukan suatu jasa, ataupun beberapa tipe transaksi lainnya yang menciptakan suatu hubungan dimana satu pihak berhutang kepada yang lain seperti misalnya, pinjaman kepada pimpinan atau karyawan.

Dari uraian diatas, menunjukkan betapa pentingnya piutang dalam suatu perusahaan, oleh karena itu menyebabkan piutang merupakan salah satu dari aktiva yang sangat likuid, yang biasanya di konversikan kedalam kas dalam suatu periode

3) Soemarso S. R. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku Kesatu, Edisi Keempat. Cetakan Kedelapan, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 365

kurang dari satu tahun. Maka piutang digolongkan kedalam aktiva lancar dalam neraca perusahaan.

B. Klasifikasi piutang

Menurut Standar Akuntansi Keuangan klasifikasi piutang sebagai berikut :

Menurut sumber terjadinya, piutang diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal. Sedangkan piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat ditagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Kadang-kadang seluruh piutang usaha diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Dalam kasus demikian, jumlah piutang usaha yang jangka waktu penagihannya lebih dari satu tahun atau siklus usaha normal, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 4)

Berdasarkan pengertian diatas maka piutang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan menurut dasar klasifikasinya, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan sebab terjadinya, piutang dapat diklasifikasikan menjadi :

1.1. Piutang Dagang

Piutang Dagang merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang.

4) Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 1994, PSAK NO. 9, Paragraf 07, Seksi 9.4.

Atau jasa perusahaan secara kredit, dalam rangka kegiatan usaha perusahaan.

1.2. Piutang Non –dagang atau piutang lain-lain

Merupakan piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan barang atau jasa dan di luar kegiatan usaha perusahaan. Misalnya, piutang pegawai, uang muka pada cabang perusahaan, piutang dividen, piutang bunga.

2. Berdasarkan jangka waktu pembayarannya, piutang dapat diklasifikasikan menjadi :

2.1. Piutang jangka pendek, yang mempunyai saat jatuh tempo kurang dari satu tahun atau kurang dari satu siklus operasi perusahaan.

2.2. Piutang jangka panjang, adalah piutang yang mempunyai saat jatuh tempo lebih dari satu tahun, atau lebih dari satu siklus operasi perusahaan.

3. Berdasarkan bentuk perjanjiannya, dapat diklasifikasikan menjadi :

3.1. Piutang tidak tertulis, yaitu piutang yang tidak didukung oleh surat perjanjian hutang piutang. Piutang jenis ini biasanya adalah piutang dagang. Piutang dagang harus diklasifikasikan menurut keadaannya, telah dijual atau dijamin.

3.2. Piutang Wesel, yaitu piutang yang didukung oleh suatu surat perjanjian. Piutang Wesel ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi :

3.2.1 Berdasarkan bunganya :

- Piutang wesel tanpa bunga, yaitu piutang yang secara eksplisit

UNIVERSITAS MEDAN AREA cantumkan tingkat bunga atas utang tersebut.

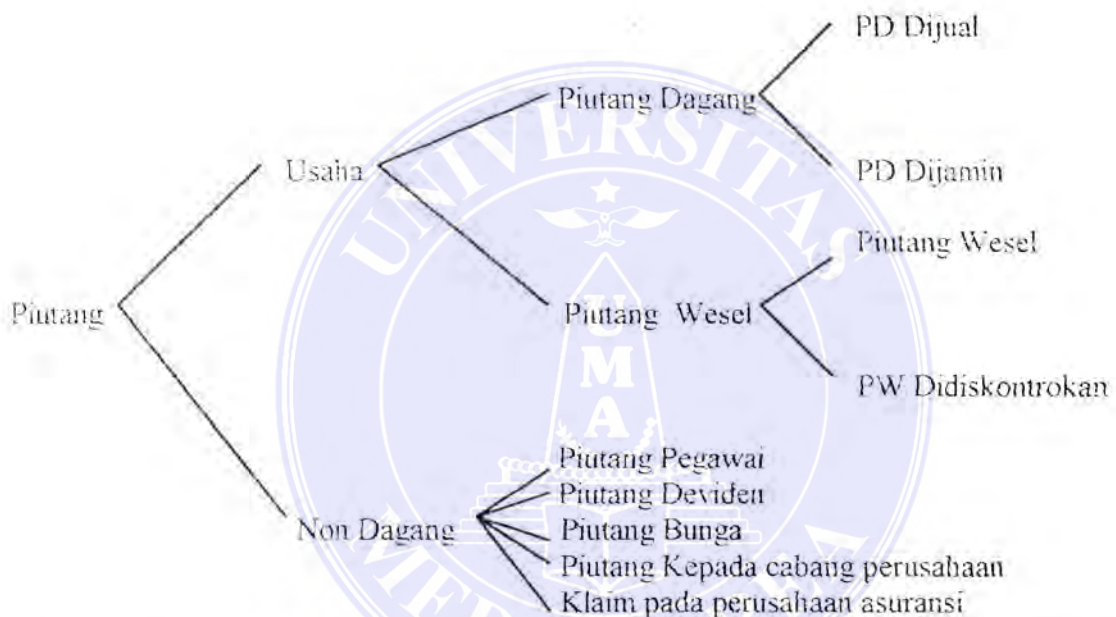
- Piutang wesel dengan bunga , yaitu piutang wesel yang mencantumkan tingkat bunga yang akan diperoleh kreditur dalam surat perjanjiannya.

3.2.2. Berdasarkan keadaan apakah wesel tertentu sudah dijual dengan jaminan untuk dibeli kembali apabila debitur tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo:

- Piutang wesel biasa, yaitu belum dijual, dan
- Piutang wesel yang didiskontokan, yaitu piutang wesel yang telah dijual dengan perjanjian perusahaan akan membeli kembali apabila pada tanggal jatuh tempo debitur tidak membayar hutangnya.
- Piutang Wesel yang didiskontokan, yaitu piutang wesel yang telah dijual dengan perjanjian perusahaan akan membeli kembali apabila pada tanggal jatuh tempo debitur tidak membayar hutangnya.
- Piutang wesel yang didiskontokan, yaitu piutang wesel yang telah dijual dengan perjanjian perusahaan akan membeli kembali apabila pada tanggal jatuh tempo debitur tidak membayar hutangnya.

Secara ringkas klasifikasi piutang tersebut di atas dapat dilihat pada gambar seperti berikut ini :

Gambar 1
Klasifikasi Piutang



Sumber : Drs. Ainun Na'im, Akt. Akuntansi Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama
Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1993, hal 229.

C. Metode Pencatatan Piutang

Piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa pada umumnya dicatat pada saat hak atas barang tersebut berpindah kepada pembeli. Dengan kata lain piutang dapat dicatat dan diakui setelah barang-barang yang dijual tersebut dikirim kepada pembeli.

S. Hadibroto dan Witarsa mengemukakan bahwa dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Faktur penjualan, untuk mencatat penjualan barang atau jasa secara kredit.
2. Nota kredit, untuk mencatat barang yang dikembalikan atau potongan harga.
3. Jurnal voucher atas piutang atas piutang yang dihapuskan.⁵⁾

Jadi, pencatatan atas penjualan kredit dimulai dari dokumen-dokumen asli dari penjualan, yakni faktur penjualan yang telah ditandatangani, berdasarkan faktur penjualan ini dicatat dalam buku harian yang disebut dengan Jurnal Umum. Ayat jurnal untuk penjualan kredit ini adalah sebagai berikut :

	Piutang dagang	XXX
	Penjualan	XXX

Kemudian oleh bagian akuntansi dibukukan ke buku besar piutang dagang dan bagian kredit membukukannya ke buku pembantu piutang dagang. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan yang sejenis, misalnya perkiraan piutang dagang dari seluruh langganan. Sedangkan buku tambahan piutang dagang merupakan buku tambahan yang dicatat berdasarkan masing-masing langganan dan berdasarkan buku tambahan piutang dagang dapat dengan cepat diketahui kepada siapa ada piutang dan berapa saldo piutang masing-masing langganan.

Pada saat piutang dagang itu telah ditagih dan diterima tunai, maka berdasarkan bukti penerimaan kas ini kembali dicatat dalam buku jurnal sebagai berikut :

	Kas	XXX
	Piutang dagang	XXX

⁵⁾ H.S Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Sistem Pengawasan Intern (System of Internal Control)*, Edisi Kedua, Penerbit LPFE Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hal 27

Kemudian dilakukan posting ke buku besar dan buku tambahan piutang dagang untuk langganan yang bersangkutan yang melakukan pembayaran. Ada tiga metode pencatatan piutang, yaitu :

1. Transaksi dicatat kedalam buku penjualan atau penerimaan kas, pembukuan piutang diambil dari buku penjualan atau buku penerimaan kas.
2. Pencatatan langsung ke buku piutang setiap hari maupun secara priodik.
3. Tanpa penggunaan buku piutang, faktur penjualan kredit disusun berdasarkan abjad nama langganan, kumpulan faktur-faktur yang belum dibayar berfungsi sebagai piutang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh pencatatan atas piutang dagang pada PT. Julianto, di bawah ini dan berhubungan dengan contoh-contoh berikutnya :

- ❖ Saldo Akhir (per 31 Desember 1998) Rp. 300.000,- atas nama PT. Asia. Jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 1999 dan ditagih tepat waktunya.
- ❖ Tanggal 1 Januari 1999 penjualan barang secara kredit kepada PT. Intan sebesar Rp. 150.000,- dan pelunasan tanggal 2 Februari 1999. Dengan faktur No.18
- ❖ Taanggal 15 Februar 1999 penjualan barang secara kredit pada PT. Bengawan sebesar Rp. 350.000,- dan pelunasan tanggal 3 Maret 1999. Dengan faktur No. 19.
- ❖ Tanggal 5 Maret 1999 penjualan baranbg secara tunai kepada PT. Agung sebesar Rp. 125.000,-. Dengan faktur No. 20.
- ❖ Tanggal 1 April 1999 penjualan barang secara kredit kepada PT. Mutiara sebesar Rp. 130.000,-. Dengan faktur No. 21.
- ❖ Tanggal 31 Mei 1999 penjualan barang secara kredit kepada PT. Abadi sebesar

- ❖ Tanggal 1 Juni 1999 penjualan barang decara kredit pada PT. Intan sebesar Rp.700.000.- dan pelunasan tanggal 15 Juni 1999 . Dengan faktur No. 23.
- ❖ Tanggal 15 Agustus 1999 penjualan barang decara kredit pada PT. Bengawan sebesar Rp. 350.000,-. Dengan faktur No. 23.
- ❖ Tanggal 20 Oktober 1999 PT. Abadi memberikan sebuah wesel tagh untuk membayar penjualan faktur No. 22. Jauth tempo wessel 30 hari, bunga 12% tahun.
- ❖ Tanggal 1 November 1999 penjualan barang decara kredit pada PT. Mujur sebesar Rp. 500.000,-. Dengan faktur No. 25.
- ❖ Tanggal 5 Desember 1999 penjualan barang decara kredit pada PT. Eka sebesar Rp. 850.000,-. Dengan faktur No. 26.

Transaksi – transaksi di atas setelah dibukukan ke buku penjualan dan buku penerimaan kas akan terlihat sebagai berikut :

TABEL 1
 BUKU PENJUALAN PT. JULIANTO
 PER 31 DESEMBER 1999

Tanggal	No.Faktur	Nama Langganan	Jumlah
01/01/1999	18	PT. Intan	Rp. 100.000,-
15/02/1999	19	PT. Bengawan	RP. 350.000,-
05/03/1999	20	PT. Agung	Rp. 125.000,-
01/04/1999	21	PT. Mutiara	RP. 130.000,-
21/05/1999	22	PT. Abadi	Rp. 1.000.000,-
01/06/1999	23	PT. Intan	Rp. 700.000,-
15/06/1999	24	PT. Bengawan	Rp. 350.000,-
01/11/1999	25	PT. Mujur	RP. 500.000,-
05/12/1999	26	PT. Eka	Rp. 850.000,-
Total			Rp. 4.105.000,-

Sumber : Ainun Na'im, Akuntansi Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit BPEE, Yogyakarta, 1993.

TABEL 2
 BUKU PENERIMAAN KAS PT. JULIANTO
 PER 31 DESEMBER 1999

Tanggal	No. Fak.	Nama Langganan	(Debet) Kas	(Kredit)	
				Penj. Tunai	Piut. Dagang
15/01/1999	-	PT. Asia	Rp. 300.000,-	-	Rp. 300.000,-
15/02/1999	18	PT. Intan	Rp. 100.000,-	-	Rp. 100.000,-
03/03/1999	19	PT. Bengawan	Rp. 350.000,-	-	Rp. 350.000,-
05/03/1999	20	PT. Agung	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	-
15/06/1999	23	PT. Intan	Rp. 700.000,-	-	Rp. 700.000,-
Total			Rp.1575.000,-	Rp.125.000,-	Rp.1.450.000,-

Sumber : Ainun Na'im, Akuntansi Keuangan.

TABEL 3
 BUKU PIUTANG DAGANG PT. JULIANTO
 PER 31 DESEMBER 1999

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1/1/1999	Saldo awal	-	-	Rp. 300.000,-
1/1/1999	PT. Intan	Rp. 100.000,-	-	Rp. 400.000,-
15/1/1999	PT. Asia	-	Rp. 300.000,-	Rp. 100.000,-
5/2/1999	PT. Intan	-	Rp. 100.000,-	-
15/2/1999	PT. Bengawan	Rp. 350.000,-	-	Rp. 350.000,-
3/3/1999	PT. Bengawan	-	Rp. 350.000,-	-
1/4/1999	PT. Mutiara	Rp. 130.000,-	-	Rp. 130.000,-
21/5/1999	PT. Abadi	Rp. 1.000.000,-	-	Rp.1.130.000,-
1/6/1999	PT. Intan	Rp. 750.000,-	-	Rp.1.830.000,-
15/6/1999	PT. Intan	-	Rp. 700.000,-	Rp.1.130.000,-
15/8/1999	PT. Bengawan	Rp. 350.000,-	-	Rp.1.480.000,-
20/10/1999	PT. Abadi	-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 480.000,-
1/11/1999	PT. Mujur	Rp. 500.000,-	-	Rp. 980.000,-
5/12/1999	PT. Eka	Rp. 850.000,-	-	Rp.1.830.000,-
Total		Rp. 3.980.000,-	Rp.2.450.000,-	Rp.1.830.000,-

Sumber : Ainun Na'im, Akuntansi Keuangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/4/24

Pada akhir tahun dapat disusun daftar perincian piutang dagang sebagai berikut :

TABEL 4.
DAFTAR PERINCIAN PIUTANG DAGANG
PT. JULIANTO
PER 31 DESEMBER 1999

Tanggal	Nama perusahaan	No.Faktur	Jumlah
1/4/1999	PT. Mutiara	21	Rp. 130.000,-
15/8/1999	PT. Bengawan	24	Rp. 350.000,-
1/11/1999	PT. Mujur	25	Rp. 500.000,-
5/12/1999	PT. Eka	26	Rp. 850.000,-
Total			Rp. 1.830.000,-

Sumber : Ainun Na'im, Akuntansi keuangan.

Jurnal Penyesuaian Piutang Wesel yang belum jatuh tempo !

Penentuan bunga :

Bunga = $NN \times TB \times WP$; NN = Nilai nominal wesel

TB = Tingkat bunga per tahun

(1 tahun dihitung 360 hari)

Bunga = Rp. 1.000.000,- X 0,12 X 90 / 360

= Rp. 30.000,-

Seandainya perusahaan, tutup buku setiap tanggal 31 Desember, maka pada tanggal 31 Desember 1999 harus membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat bunga yang masih harus diterima. Perhitungan sebagai berikut :

(Waktu pembuangan = 20 Okt 1999 s/d 31 Des 1999 = 72 hari)

Bunga = Rp. 1.000.000,- x 0, 12 x 72 / 360 =Rp. 24.000.-

Jurnal penerimaan wesel :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20/10 1999	Piutang wesel	1.000.000	-
	Piutang dagang	-	1.000.000

Jurnal Penyesuaian

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31/12 1999	Piutang bunga	24.000	-
	Pendapatan bunga	-	24.000

Perusahaan pada umumnya menawarkan potongan kas kepada langganan untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo piutang dagang.

Potongan kas baru dapat diperoleh langganan apabila pembayaran piutang dagang dilaksanakan tidak melampaui periode waktu yang telah disepakati. Disamping itu barang dagangan yang telah dijual juga mempunyai kemungkinan dikembalikan oleh langganan karena adanya barang yang cacat atau alasan –alasan lainnya. Biasanya perusahaan menyampaikan nota kredit kepada langganan yang menunjukkan jumlah uang yang dikreditkan kepada langganan yang disertai dengan alasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perusahaan dalam pengkreditan tersebut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/4/24

Dampak dari potongan kas dan retur penjualan akan mengurangi nilai penjualan sekaligus nilai piutang dagang. Untuk mencatat potongan kas dan retur penjualan jumlahnya adalah :

Retur penjualan	XXX
Potongan penjualan	XXX
Piutang dagang	XXX

D. Penilaian Piutang

Secara teoritis, piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa harus dilaporkan menurut nilai bersih yang dapat direalisasi atau nilai tunai, yaitu jumlah yang diharapkan akan ditagih.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan penilaian piutang sebagai berikut :

“Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.” 6)

Pada dasarnya, jumlah piutang yang tidak dapat direalisasi adalah merupakan biaya yang mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu kita harus menentukan taksiran jumlah piutang yang tidak terealisasi dengan menggunakan cara yang tepat.

Dalam menentukan dasar penaksiran jumlah piutang yang tidak tertagih terdapat dua cara yaitu didasarkan kepada :

- "1. Jumlah penjualan untuk periode itu.
2. Jumlah piutang yang beredar pada periode itu"

Ket. 1). Penaksiran Jumlah Penjualan

Apabila perusahaan memakai cara ini dalam menaksir piutang yang tidak tertagih maka perusahaan menaksir jumlah persentase yang tidak tertagih dari seluruh jumlah penjualan kredit yang telah dilakukan perusahaan. Didalam menaksir jumlah persentase ini, biasanya didasarkan kepada pengalaman dimasa lalu. Dari pengalaman masa lalu inilah diketahui berapa persentase rata-rata uang tidak tertagih dari jumlah penjualan kredit. Dengan demikian taksiran jumlah piutang yang tidak tertagih dalam satu periode akuntansi ditentukan dengan mengalikan taksiran persentase yang tidak tertagih dengan jumlah penjualan kredit. Hasil perkalian ini merupakan biaya perusahaan period itu

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari contoh terdahulu, yaitu :

Saldo piutang awal per 1 / 1 1999	Rp. 300.000,-
Penjualan kredit selama tahun 1999	<u>Rp. 3.980.000,-</u>
	Rp. 4.280.000,-
Hasil penagihan piutang selama tahun 1999	<u>Rp. 2.450.000,-</u>
Saldo piutang akhir per 31 / 12 / 1999	Rp. 1.830.000,-

Saldo penyisihan piutang tak tertagih Rp. 50.000,- Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya diaksir sebesar 5 % dari penjualan kredit yang tak tertagih yaitu :

$5\% \times \text{Rp. } 3.980.000,- = \text{Rp. } 199.000,-$

Maka harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31 / 12 / 1999	Biaya piutang tak tertagih	199.000	-
	Penyisihan piutang tak tertagih	-	199.000

Sehingga saldo penyisihan piutang tak tertagih setelah jurnal penyesuaian ini akan menjadi Rp. 249.000,- yaitu jumlah yang masih tersisa sebesar Rp. 50.000,- ditambah dengan penyisihan tahun 1999 sebesar Rp. 199.000,-.

Jumlah beban piutang yang tak tertagih yang menjadi biaya tersebut dengan menggunakan taksiran jumlah penjualan adalah lebih besar dibandingkan dengan taksiran jumlah piutang. Karena jumlah keseluruhan penjualan kredit semuanya menjadi biaya dan saldo yang masih tersisa dari periode yang lampau diabaikan.

Ket. 2.). Penaksiran Jumlah Piutang

Terdapat dua metode penetapan penyisihan untuk piutang tak tertagih apabila perusahaan menggunakan piutang sebagai dasar penaksiran, yaitu :

- a. Penyisihan disesuaikan dengan suatu persentase tertentu dari piutang dagang.
- b. Penyisihan disesuaikan dengan suatu jumlah yang ditentukan dengan menentukan umur dari piutang dagang.

Ad. 2). A. Penyisihan disesuaikan dengan persentase tertentu dari piutang dagang.

Metode ini berdasarkan taksiran suatu persentase tertentu yang tak tertagih atas piutang untuk menghitung taksiran jumlah piutang tak tertagih. Dalam hal ini tadi hasil perkalian antara persentase tak tertagih dengan jumlah piutang pada akhir periode merupakan penyisihan piutang tak tertagih yang diharapkan.

Ilustrasi :

Saldo piutang awal per 1 / 1 / 1999	Rp. 300.000,-
Penjualan kredit selama tahun 1999	Rp. 3. 980.000,-
	Rp.4. 980.000,-
Hasil penagihan piutang selama tahun 1999	Rp. 2. 980.000,-
Saldo piutang akhir per 31 / 12 /1999	Rp. 1. 980.000,-

Saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp. 50.000,-

Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya terdapat 5 % dari piutang yang tidak dapat ditagih kembali maka jumlah penyisihan piutang tak tertagih adalah :

$5 \% \times \text{Rp.1.830.000,-} = \text{Rp. 91.00,-}$

Jumlh ini merupakan penyisihan piutang tak tertagih yang diinginkan. Maka yang menjadi biaya piutang tak tertagih tahun 1999 adalah Rp. 41.000,-

Jurnal Penyesuaian :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31 / 12 / 1999	Biaya piutang tak tertagih	41.500	-
	Penyisihan piutang tak tertagih	-	41.500

Ad. 2). B.Penyisihan disesuaikan dengan suatu jumlah yang ditentukan dengan cara menentukan umur dari piutang dagang.

Dengan cara ini taksiran jumlah piutang tak tertagih dihitung berdasarkan taksiran dari suatu persentase tertentu dari masing – masing umur piutang dagang. Oleh sebab itu diperlukan suatu analisa piutang yaitu dengan mengadakan penggolongan masing – masing piutang dagang itu ke dalam kelompok umur, sehingga dengan mudah ditentukan jumlah persentase yang tak tertagih dari masing – masing piutang.

Persentase taksiran piutang dagang tak tertagih akan semakin tinggi apabila makin lama piutang dagang tersebut melampaui tanggal jatuh waktunya. Jumlah taksiran piutang tak tertagih diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian masing – masing persentase yang tak tertagih dengan jumlah masing – masing piutang.

Untuk mengetahui berapa nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 1999 dengan cara menentukan umur piutang dagang, maka berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan contoh dari PT. Julianto sebagai berikut :

TABEL 5
DAFTAR UMUR PIUTANG
PT. JULIANTO
PER 31 DESEMBER 31

Nama	Saldo	Belum jatuh Tempo	Setelah Jatuh Tempo (Hari)		
			1 s/s 60	91 s/d 180	181 s/d 360
Langganan	31-12-1999				
PT. Mutiara	Rp. 130.000				Rp. 130.000
PT. Bengawan	Rp. 350.000			Rp. 350.000	
PT. Mujur	Rp. 500.000		Rp. 500.000		
PT. Eka	Rp. 850.000	Rp. 850.000			
Total	Rp.1.830.000	Rp.850.000	Rp.500.000	Rp.350.000	Rp. 130.000

Sumber : Ainum Na'im, Akuntansi Keuangan.

Kemudian untuk memperoleh jumlah taksiran piutang tak tertagih dari tiap golongan umur piutang, kita mengalikan jumlah piutang masing-masing golongan umur piutang tersebut dengan persentase tertentu yang didasarkan pengalaman tahun lalu.

TABEL 6
TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
PT. JULIANTO
PER 31 DESEMBER 1999

Klasifikasi Umur Piutang	Saldo taksiran Piutang Tak Tertagih	
	Persentase	Jumlah
Belum jatuh tempo	Rp.850.000,- 2 %	Rp. 17.000,-
Sudah jatuh tempo		
1 s/d 30 hari	3 %	
31 s/d 60 hari	Rp. 500.000,- 4 %	Rp. 20.000,-
61 s/d 90 hari	5 %	
91 s/d 180 hari	Rp. 350.000,- 10 %	Rp. 35.000,-
181 s/d 365 hari	Rp. 130.000,- 50 %	Rp. 65.000,-
Diatas 365 hari	80 %	
Total	Rp. 1.830.000,-	Rp. 137.000,-

Sumber : Ainum Na'im, Akuntansi Keuangan

Dengan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa dengan jumlah piutang yang sebesar Rp. 1.830.000,- taksiran piutang tak tertagih adalah sebesar Rp. 137.000,- apabila

yang menjadi biaya piutang tak tertagih adalah Rp. 87.000,- (Rp. 137.000 – Rp. 50.000).

Jurna Penyesuaian Piutang tak tertagih :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
31 12 1999	Biaya kerugian piutang	87.000	—
	Penyisihan Kerugian piutang	—	87.000

Metode Penghapusan Piutang Tak Tertagih ada dua cara yaitu :

1 Metode Langsung

Menurut metode langsung, tidak dibuat taksiran piutang tak tertagihnya, tetapi pada saat piutang benar-benar dinyatakan tidak dapat tertagih oleh perusahaan, pada saat itu langsung dihapuskan dengan jurnal :

Biaya Kerugian piutang	xxx
Piutang dagang	xxx

Metode ini dilakukan oleh perusahaan yang kecil atau perusahaan tidak dapat menaksir piutang yang tidak dapat tertagih. Metode ini bertentangan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia karena piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima..

2 Metode Penyisihan.

Menurut metode ini penyisihan terhadap piutang setiap akhir periode diadakan penafsiran terhadap besarnya piutang yang tidak dapat direalisasi. Dalam hal ini surat-surat berharga akan disisihkan dengan cara mendebet perkiraan biaya

kerugian piutang dan mengkredit penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut :

Penyisihan Kerugian piutang	XXX
Piutang dagang	XXX

Apabila pada saat betul-betul terjadi piutang yang tidak dapat direalisasi, berarti sebagian dari cadangan kerugian piutang tersebut dipakai, karena itu akan berkurang.

Adanya piutang dagang yang tidak dapat ditagih akan dijurnal :

Penyisihan Kerugian piutang	XXX
Piutang dagang	XXX

E. Penyajian Piutang.

Pada akhir tahun buku, perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, daftar laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan. Pada neraca umumnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu perkiraan Harta, Hutang dan Modal. Sedangkan perkiraan piutang dikelompokkan kepada harta lancar yang umumnya disusun dengan urutan piutang dagang, piutang wesel, piutang pegawai dan piutang lain-lain.

Karena lazim untuk mencantumkan perkiraan aktiva menurut likuiditasnya yaitu menurut aktiva itu dapat dikonversikan ke kas dalam operasional normal, maka piutang disajikan di neraca setelah urutan perkiraan kas dan.

Penyajian piutang dagang pada neraca haruslah tepat, apabila tidak maka hal ini akan membingungkan atau menimbulkan salah pengertian dari pembaca neraca, sehingga mengakibatkan fungsi laporan keuangan sebagai alat penyampaian informasi tidak terpenuhi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 4/4/24

Standar Akuntansi Keuangan mengemukakan sebagai berikut :

“Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih” 8)

Sehingga di Neraca ,perkiraan piutang harus disajikan sebagai berikut :

TABEL 7
PT. JULIANTO
NERACA
PER 31 DESEMBER 1999

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
-KAS	1.575.000
-SURAT-SURAT BERTAGIH	5.000.000
-PIUTANG DAGANG	1.830.000
-PENY. PIUTANG DAGANG TAK TERTAGIH (137.000)	
PIUTANG DAGANG BERSIH	1.693.000
-PIUTANG WESEL	1.000.000
-PIUTANG KARYAWAN	250.000
-PIUTANG BUNGA	24.000
TOTAL AKTIVA LANCAR	Rp 9.542.000,-

Sumber : Ainum Na'im, Akuntansi Keuangan

8) Ikatan Akuntan Indonesia, Op. Cit, PSAK No. 9, Seksi 07, Paragraf (e) (iv), hal 9.4-9.5.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 4/4/24

BAB III

PT. PLN (Persero) WILAYAH II SUMUT CABANG MEDAN

A. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

a. Sejarah Sebelum Kemerdekaan

Sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada tahun 1893 di daerah Batavia datau Jakarta sekarang. Tiga puluh tahun kemudian (1921) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya di bangun di pertapakan kantor PLN CABANG Medan yang sekarang di jalan Listrik No. 8 Medan, di bangun oleh NV NIGEM / OGEM perusahaan swasta Belanda.

Kemudian menyusul pembangunan listrik di Tanjung Pura dan Pangkalan Brandan 1924, Tebing Tinggi 1927, Sibolga, Brastagi dan Tarutung 1929, Tanjung Balai 1931, labuhan Bilik 1936 dan Tanjung Tiram 1937.

Pada masa penjajahan Jepang, perusahaan listrik berada di tangan Jepang dengan mendatangkan tenaga-tenaga dari Jepang. Tetapi Jepang hanya mengambil alih pengelolaan perusahaan listrik milik swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan penambahan jalan. Daerah kerjanya dibagi menjadi perusahaan listrik Sumatera dan perusahaan listrik Jawa yang disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan Jepang pada waktu itu.

b. Listrik di awal kemerdekaan sampai tahun 1985

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
dikumandangkan Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diseluruh penjuru

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)4/4/24

tanah air untuk mengambil alih perusahaan listrik swasta Belanda dari tangan tentara Jepang. Aksi ambil alih itu selesai bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengenang peristiwa ambil alih itu, maka dengan penetapan pemerintahan No. 1 s/d 45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai hari Listrik. Tetapi belakangan ini hari listrik disatukan dengan hari Kebaktian Pekerjaan Umum.

Setelah ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri perusahaan listrik distribusi cabang Sumatera Utara yang mula-mula dikepalai oleh R Sukarno (merangkap kepala di Aceh), dan tahun 1959 dikepalai oleh Ahmat Syaitullah. Kantornya berada di Sei Batu Gingging (sekarang jadi gudang PLN) setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri No. 16/ 120 tanggal 20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan di ubah, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau menjadi PLN Eksploitasi II dipimpin oleh Ir. Dudung Yachasumitra.

Tahun 1965 BPU PLN dibubarkan dengan peraturan Menteri No. 1/ PRT/ 65 ditetapkan daerah pembagian kerja PLN menjadi 15 kesatuan daerah Eksploitasi Sumatera Utara tetapi menjadi eksploitasi I dipimpin oleh Ir. Dudung Yachasumitra, Aceh menjadi eksploitasi XIII, Sumatera Barat dan Riau menjadi eksploitasi XIV.

c. Eksploitasi I menjadi Eksploitasi II

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Eksploitasi I Sumatera Utara tersebut, maka dengan keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/ DIK/ PLN/ 66 tanggal 14 April 1966 PLN Eksploitasi I dibagi menjadi empat cabang dan satu sektor yaitu

cabang Medan, Binjai, Sibolga, Pematang Siantar dan satu sektor yaitu sektor glugur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pada tanggal 12 April 1969 dengan SK Menteri PU & T No. 57/ Kpts/ 1969 dan No. 193/ Kpts/ 1969 awer Sk Dirjend GATRIK No. 12/ K/ 69 Jabatan Pemimpin Eksploitasi diserahkan dari Ir. Dudung Yachsumitra kepada Ir. Darmono dan PLN waktu itu dibagi menjadi 14 eksploitasi dan 4 PLN pembangunan.

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik di seluruh Indonesia. Kemudian disusul dengan keputusan Menteri PUTL No. 01/ PRT/ 73 untuk menetapkan perubahan PLN dari Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perum sebagai satu-satunya perusahaan negara yang dibentuk oleh pemerintah untuk membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik di Indonesia. Dalam SK Menteri tersebut ditetapkan pula pembagian daerah PLN menjadi 14 eksploitasi, 4 daerah distribusi dan 3 daerah pembangkitan dan sejak itu PLN eksploitasi I Sumatera Utara diganti menjadi PLN Eksploitasi Sumatera Utara.

d. Eksploitasi II Menjadi Wilayah II

Perubahan struktur organisasi tersebut dengan keputusan direksi PLN No. 295/ PST/ 74 yang menetapkan dan menunjuk Ir. Semiawan sebagai pejabat sementara pimpinan PLN Eksploitasi II proyek Jaringan Transmisi Sumatera Utara, terhitung mulai 22 Maret 1974 menggantikan Ir. Darmono yang diangkat menjadi ass. Direktur Biro Manajemen PLN Pusat. Serah terima jabatan dilaksanakan 28 Maret 1974 disaksikan Direktur Utama PLN Ir. Abdul Kadir.

Kemudian menyusul peraturan Menteri PUTL No. 012/ PRT/ 75 yang merubah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PLN Eksploitasi II PROLIS yang diasuh oleh direksi. Sementara organisasi direksi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PLN mengalami perusahaan pula. PLN eksploitasi II menjadi PLN wilayah II Sumatera Utara, PLN Pembangunan VIII kemudian menjadi PLN pembangunan PLN I dan berubah menjadi Proyek untuk Pembangkit Jaringan Sumatera Utara.

Dengan demikian pesatnya pembangunan pembangkit listrik di Sumatera Utara maka tidak mungkin lagi bagi Ir. R. Seniawan untuk merangkap jabatan pimpinan PLN wilayah II dan PLN PIKTRING Sumatera Utara terlebih-lebih selama beroperasinya PLTD Titi Kuning dan hampir rangkuman PLTG Paya Pasir, maka dalam SK Menteri PUTU No. 15/ KPTS/ 77, Ir. JRE. Mowilos ditunjuk menjadi pimpinan PLN Wilayah II menggantikan Ir. R Seniawan. Serah terima jabatan dilakukan di Medan tanggal 22 Juni disaksikan oleh Direktur Utama PLN Pro. Ir. Suryono.

Pada masa kepemimpinannya Ir. JRE. Mowilos berhasil mengantarkan PLN Wilayah II sampai pada tingkat Break Even Point, bahkan di hari-hari terakhir kedireksiannya Pro. Ir. Suryono dengan SK No. 029/ DIR/ 80 tanggal 28 Oktober 1980 menaikkan kelas PLN wilayah II dari kelas B Pola II menjadi kelas A Pola III. Maka struktur lama yang hanya terdiri dari 3 bagian dan 10 seksi berubah menjadi 3 bidang , 10 bagian menjadi 27 seksi yang kemudian disempurnakan lagi dengan SK Direksi No. 027/ DIR/ 85 menjadi 4 ditambah KONTRINI 15 bagian dan PLORIS berdiri sendiri yang pemimpinnya merangkap Deputy Menteri PERTAMBEN 1016/ PKTS/ M/ 82 maka pada tanggal 30 Oktober 1982 jabatan pemimpin disaksikan oleh Direktur Utama PLN Ir. Sardjonio.

e. Perum Menjadi Persero
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dalam rangka peningkatan efisiensi efektivitas usaha penyediaan tenaga listrik, maka perusahaan umum (perum) listrik negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1990 dimulai dengan memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan (persero) sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 9 tahun 1969 sebagai pemegang kuasa tenaga listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, peralihan perum menjadi persero ditetapkan dengan peraturan pemerintah RI No. 23 tahun 1984.

Pada tahun 1996 PLN Wilayah Sumatera Utara dipimpin oleh J. Sijabat dimana tugas-tugasnya selain menyempurnakan kekurangan diwaktu lalu juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki oleh PLN Wilayah II pada masa itu.

Sejak perubahan daerah eksploitasi II menjadi Wilayah II, sesuai dengan SK Menteri PUTL No. 013/ PRT/ 70, maka sampai sekarang PLN cabang Wilayah II Medan membawahi unit-unit pelaksanaan sebagai berikut :

- PLN sektor Glugur dan sektor Belawan memproduksi tenaga listrik.
- PLN unit pengatur beban Sumatera Utara, mengatur beban pembangkitan, penyaluran tenaga listrik.
- PLN cabang Medan, ~~Dinjai~~, Pematang Siantar, Sibolga melaksanakan pendistribusian tenaga listrik.

PLN cabang membawahi PLN ranting, sub ranting dan kantor jaga, yang semuanya meliputi 40 ranting, 44 sub ranting dan 51 kantor jaga Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Medan adalah salah satu cabang diantara 4 (empat) cabang berada dibawah Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah II Sumatera Utara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

Tugas pokok Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Medan adalah pendistribusian tenaga listrik di Kotamadya Medan dan sekitarnya. Dengan demikian kegiatan utama PLN cabang Medan adalah pelayanan pendistribusian tenaga listrik kepada masyarakat / konsumen.

Untuk pelaksanaan tugas dibidang kelistrikan maka Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Medan membagi pelayanan dalam unit ranting dan rayon.

Unit ranting terdiri dari :

1. PLN ranting Belawan
2. PLN ranting Helvetia
3. PLN ranting Sunggal
4. PLN ranting Medan Denai
5. PLN ranting Pancur Batu
6. PLN ranting Tanjung Morawa
7. PLN ranting Lubuk Pakam
8. PLN ranting Perbaungan
9. PLN ranting Delitua
10. PLN ranting Galang
11. PLN ranting Labuhan Batu

Sedangkan rayon terdiri dari :

- a. Rayon Medan Timur
- b. Rayon Medan Barat
- c. Rayon Medan Selatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/4/24

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

2. Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting didalam suatu perusahaan, karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dari setiap fungsi. Bagi perusahaan yang semakin kompleks maka struktur organisasi sangat diperlukan supaya semakin jelasnya pendelegasian dan wewenang sehingga setiap anggota mengetahui kepada siapa dia bertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Dari struktur organisasi ini kita juga dapat melihat jenis organisasi apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut maka kita dapat melihat bagan organisasi dari PT. PLN (persero) Wil – II/ SU Cabang Medan adalah organisasi garis dan staf.

Di dalam struktur organisasi ini setiap kepala seksi bertanggungjawab kepada kepala bagian dan setiap kepala bagian bertanggungjawab kepada kepala cabang.

Berikut ini akan diuraikan tugas dari setiap bagian ataupun seksi yang ada di PT. PLN (persero) Wil – II/ SU cabang Medan.

Kepala Cabang

Kepala cabang adalah merupakan pimpinan dibagian cabang yang bertanggungjawab kepada pimpinan wilayah. Adapun tugas-tugas kepala cabang adalah :

- Merencanakan dan mengendalikan sarana pendistribusian tenaga listrik
- Mengoperasikan dan memelihara jaringan distribusi tenaga listrik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

- Melaksanakan pembuangan tenaga listrik dan mengadministrasikan pelanggan tenaga listrik.
- Mengolah sumber daya manusia, keuangan, material dan administrasi.

Kepala Cabang Membawahi Kepala Bagian

- A. Kepala bagian Konstruksi
- B. Kepala bagian Distribusi
- C. Kepala bagian Pelayanan
- D. Kepala bagian Administrasi

A. Kepala bagian Konstruksi

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait dengan pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka bagian konstruksi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan pendukung untuk penyelesaian proses perolehan dan pembebasan tanah..
2. Merencanakan dan melaksanakan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait.
3. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil terkait.
4. Melaksanakan administrasi terkait dan konstruksi kepala bagian konstruksi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

membayar beberapa kepala seksi.

Document Accepted 4/4/24

a. Kepala seksi perencanaan dan konstruksi

Tugas – tugasnya :

1. Melaksanakan perencanaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
2. Melaksanakan pembangunan bangunan sipil

b. Kepala seksi Pengendalian dan konstruksi

Tugas – tugasnya :

1. Penjualan, kegiatan pengendalian dan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik
2. Pengawasan pelaksanaan pembangunan serta penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipil dan membuat laporan pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan organisasi dan instansi terkait baik internal maupun eksternal.

c. Kepala seksi administrasi dan teknik

Tugas – tugasnya :

1. Melaksanakan kegiatan pelelangan, kegiatan pekerjaan pembangunan sipilnya
2. Menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipilnya serta melaporkan pelaksanaannya
3. Melaksanakan penyiapan berita acara penyelesaian pekerjaan bangunan sarana penyediaan tenaga listrik dan bangunan sipilnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

B. Kepala Bagian Distribusi

Tugas – tugasnya :

1. Merencanakan pengembangan sistem tenaga listrik untuk meningkatkan mutu dan keadaan pendistribusian tenaga listrik.
2. Merencanakan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan tenaga listrik
3. Merencanakan kebutuhan material untuk mengoperasikan dan pemeliharaan sarana.
4. Mengoperasikan dan memelihara pendistribusian dengan tenaga listrik.
5. Melayani gangguan pendistribusian tenaga listrik.

a. Kepala Seksi Perencanaan

Tugas – tugasnya :

1. Merencanakan pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik
2. Merencanakan kebutuhan material pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian
3. Membina instalasi jaringan distribusi tenaga listrik

b. Kepala Seksi Operasi Distribusi

Tugas – tugasnya :

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan gardu serta jaringan distribusi tenaga listrik

2. Melaksanakan kegiatan pengaturan operasional sistem pendistribusian tenaga listrik
3. Melaksanakan penyusunan sasaran operasi pemeriksaan alat pembatas dan pengukur langganan
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan alat pembatas atau pengukur pelanggan
5. Melaksanakan pembuatan serta acara pemeriksaan dan penyimpanan dokumen serta barang bukti penyalahgunaan jaringan tenaga listrik pada pelanggan

a. Kepala Seksi Peneraan

Tugas – tugasnya :

1. Merencanakan kegiatan yang pereraan
2. Menuntun program peneraan ulang sesuai dengan target yang telah ditentukan
3. Mengawasi penggunaan tanggal segel agar tidak terjadi penyalahgunaan
4. Mengawasi pendayagunaan sarana kerja yang berkaitan dengan peneraan

C. Kepala Bagian Pelayanan

Tugas – tugasnya :

1. Menyusun perkiraan tenaga listrik
2. Menyusun dan menerapkan program penjualan tenaga listrik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

a. Kepala Seksi Penyambungan

Tugas – tugasnya :

1. Menjadwal pengawasan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah dan APP
2. Melaksanakan pemasangan dan pembongkaran sambungan rumah dan APPnya

b. Kepala Seksi Pengolahan Data

Tugas – tugasnya :

1. Merencanakan perencanaan aplikasi komputer
2. Melaksanakan rekaman data
3. Melaksanakan pelayan informasi hasil-hasil pengolahan data
4. Melaksanakan operasi pengolahan data
5. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan media data
6. Melaksanakan pendistribusian pengolahan data
7. Melaksanakan pengaturan pelayanan pemakaian komputer

D. Kepala Bagian Administrasi

Tugas – tugasnya

1. Melaksanakan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut investasi dan operasi
2. Melaksanakan pencatatan aktiva tetap PDP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

3. Melaksanakan pencatatan persediaan barang dan transaksi barang gudang
4. Melaksanakan pembuatan laporan pembukuan tahunan dan rencana

a. Seksi Kepegawaian mempunyai tugas pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan pengurusan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai
2. Pelaksanaan tata usaha penggajian, pengupahan sumber daya manusia
3. Pelaksanaan pemberian kesejahteraan pegawai
4. Pembinaan keselamatan dan kesejahteraan kerja

b. Seksi Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pendapatan cabang serta membantu pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi anggaran dan keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan rencana kerja dan anggaran
2. Pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang
3. Pengolahan dan daur kas
4. Pengasuransian harta kekayaan perusahaan

5. Pencatatan pajak perusahaan

c. Seksi Akuntansi mempunyai tugas pokok

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap pekerjaan dan pelaksanaan serta persediaan barang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi akuntansi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut investasi dan operasi
2. Pelaksanaan pencatatan aktiva dan PDP
3. Pelaksanaan pencatatan persediaan barang dan transaksi barang gudang
4. Pelaksanaan pembuatan laporan pembukuan tahunan dan neraca

d. Seksi Perbekalan

Tugas – tugasnya :

1. Melaksanakan ketatausahaan perbekalan baik untuk material konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik maupun alat tulis kantor
2. Melaksanakan penyimpanan barang dan pengamanannya
3. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengamanan barang
4. Mengadministrasikan barang dan material

e. Kepala Seksi Sekretariat Umum

Tugas – tugasnya :

1. Mengencanakan kebutuhan sarana kerja

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2. Melaksanakan tatausaha kesekretariatan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

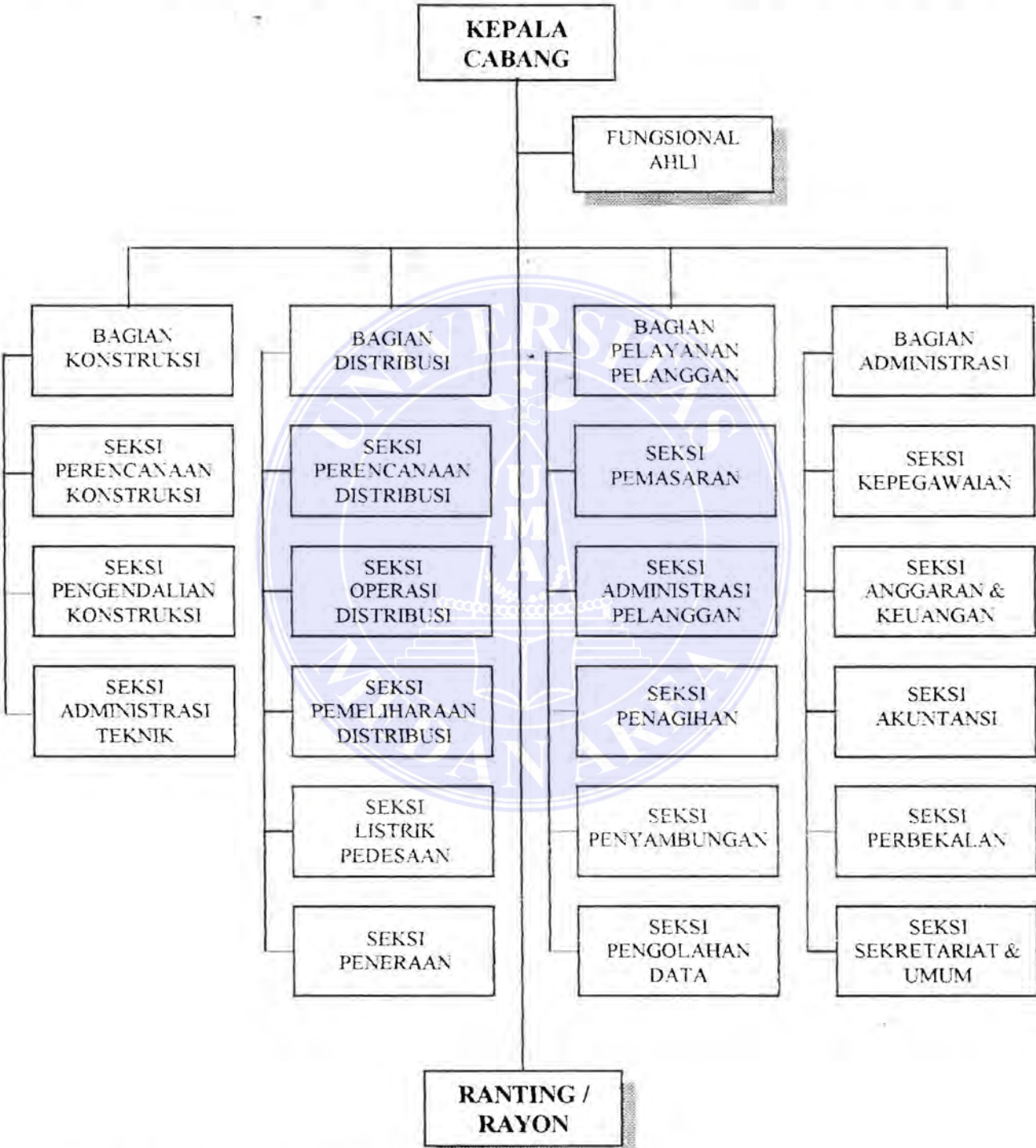
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- 3. Melaksanakan kegiatan rumah tangga satuan organisasi terkait
- 4. Melaksanakan pengembangan lingkungan kerja
- 5. Melaksanakan pengurusan surat-surat tanah
- 6. Melaksanakan kegiatan hubungan kerja

Berikut ini penulis sajikan bagan struktur organisasi perusahaan tersebut :



Gambar 2. STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (Persero) WILAYAH II SUMUT CABANG MEDAN



3. Bidang Kegiatan Perusahaan

Seperti kita ketahui listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting didalam kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan berbagai aktivitas, seperti rumah-rumah, di hotel, di perusahaan dan perindustrian, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Keputusan Presiden No. 123 tahun 1963, instalasi milik PT. PLN (Persero) ditetapkan sebagai instalasi vital.

Bidang kegiatan PT. PLN (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat, saat ini telah menyelenggarakan empat bidang kegiatan yaitu :

1. Membangun tenaga listrik
2. Membangkitkan tenaga listrik
3. Menyalurkan tenaga listrik
4. Mendistribusikan tenaga listrik

Dalam hal mewujudkan ke empat bidang kegiatan tersebut para petugas terus bersiaga baik siang dan malam diruang kontrol mesin dan unit – unit pengaturan beban.

Untuk mendukung kegiatan tersebut PT. PLN (Persero) memiliki visi dan misi serta strategi melaksanakan visi tersebut. Visi PT. PLN (Persero) adalah meningkatkan pelayanan yang modern, efisien dan mandiri yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Misi PT. PLN (Persero) adalah :

1. Beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip usaha yang sehat dengan melakukan kegiatan yang menguntungkan untuk membiayai perkembangan penyediaan tenaga listrik.
2. Sebagai agen pembangunan yang berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, meningkatkan kegiatan ekonomi serta menjadi perintis kegiatan penyediaan tenaga listrik dan bisnis terkait.

Strategi Perusahaan terdiri dari :

1. Meningkatkan mutu dan keadaan
2. Meningkatkan efisiensi
3. Pemasaran
4. Peningkatan sumber daya manusia
5. Sistem manajemen informasi dan komputer
6. Peningkatan hubungan masyarakat

Bidang kegiatan yang terdapat pada cabang secara umum adalah melakukan tugas operatif yang penjualan tenaga listrik serta pelayanan kepada para pelanggan.

Bidang kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pelaksanaan penjualan tenaga listrik
2. Pelaksanaan perusahaan sarana penyediaan tenaga listrik
3. Pengelolaan sumber daya manusia
4. Pengelolaan keuangan dan administrasi
5. Pengelolaan sarana penyediaan tenaga listrik serta suku cadangnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Klasifikasi Piutang

Klasifikasi piutang pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan terdiri dari :

1. Piutang Dagang

Piutang dagang PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan adalah hasil dari penjualan energi listrik per KWH yang dijual kepada pelanggan dan dilakukan penagihan piutang (collection period) pada setiap bulan.

Dalam melaksanakan pemberian kredit kepada pelanggan, pihak PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan melakukan klasifikasi piutang terhadap pelanggannya menjadi beberapa golongan yaitu :

a) Pelanggan Umum

Terdiri dari rumah tangga, badan sosial, usaha, perhotelan, dan industri

b) Pelanggan ABRI

Merupakan instansi di lingkungan kedinasan ABRI yang meliputi kantor-kantor ABRI, markas, kantor jaga dan perumahan dinas di jajaran angkatan darat, angkatan laut, dan kepolisian

c) Pelanggan Pemerintah non ABRI

Pelanggan ini adalah biro-biro instansi pemerintah pusat seperti kantor wilayah, kantor departemen, lembaga-lembaga pemerintah dan intuisi pemerintah

d) Pelanggan Pemerintahan Daerah

Golongan pelanggan ini merupakan biro milik pemerintah daerah seperti kantor gubernur, kantor daerah tingkat II, kantor kecamatan, dinas-dinas dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/4/24

e) Pelanggan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

Merupakan golongan pelanggan dari badan milik negara atau daerah seperti Telkom, bank-bank pemerintah, perusahaan air minum dan sebagainya

2. Piutang Karyawan

Merupakan piutang yang terjadi dalam rangka membantu karyawan dan diberikan berupa pinjaman. Pinjaman ini baru diberikan apabila dinilai layak untuk diberikan, dan penyerahannya diberikan langsung oleh kepala cabang.

Pembayaran dilakukan melalui angsuran dengan jalan melakukan pemotongan gaji setiap bulannya dari karyawan yang bersangkutan. Para karyawan yang telah melakukan pinjaman, tidak akan diberikan lagi pinjaman jika pinjaman sebelumnya belum lunas dibayar dan dibuat suatu surat perjanjian untuk masing-masing pihak.

3. Piutang bunga / denda

Piutang bunga atau denda yang dimaksud adalah piutang yang muncul dikarenakan adanya tunggakan rekening listrik pelanggan, yang sesuai dengan peraturan harus dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening tersebut. Besarnya denda dihitung dengan peraturan perusahaan.

C. Metode Pencatatan dan Prosedur Piutang

Metode Pencatatan

Pencatatan piutang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan mencatat transaksi berdasarkan bukti-bukti atau dokumen asli perusahaan yaitu rekening listrik yang dapat dilihat dalam tabel yang dibuat sesuai ketentuan Tata Usaha Langganan PT. PLN (Persero) yang dinamakan Laporan Piutang Pelanggan.

Laporan piutang pelanggan atau tabel ikhtisar piutang berisikan data-data sebagai berikut :

1. Saldo Awal

Saldo awal PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan terdiri dari :

- a. Rekening berjalan, merupakan rekening listrik yang telah jatuh tempo dan ditagih kepada masyarakat tanggal 1 s/d 20 setiap bulannya.
- b. Rekening tunggakan, merupakan rekening listrik yang telambat pembayarannya dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan perusahaan.

Rekening listrik ini terdiri dari :

- (1) Dilegalisasi, artinya rekening listrik yang telah disyahkan atau diperbolehkan oleh perusahaan untuk menunda pembayarannya sampai dengan batas waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Rekening tertunggak yang dilegalisasi ini hanya diberikan kepada rekening untuk golongan ABRI saja.

- (2) Tidak dilegalisasi, artinya rekening listrik yang tanpa disetujui oleh perusahaan untuk menunda pembayarannya. Piutang tertunggak yang tidak dilegalisasi ini akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan golongan tarif untuk setiap bulan keterlambatan.

2. Kolom Pengurangan

Yang termasuk dalam kolom pengurangan dalam laporan piutang pelanggan adalah :

- a. Dilunasi, merupakan penerimaan kas yang diperoleh perusahaan atas pembayaran piutang listrik oleh para pelanggan. Rekening yang dilunasi ini dibagi atas :
 - (1) Rekening baru, rekening yang jatuh tempo pada bulan bersangkutan.
 - (2) Rekening berjalan, rekening yang jatuh tempo pada bulan sebelumnya.
 - (3) Rekening tunggakan, rekening yang telah terlambat pembayarannya.
- b. Dipindahkan ke Wilayah II Sumatera Utara, artinya pelanggan yang pindah alamat dan berada di luar rayon Cabang Medan.
- c. Dipindah bukukan ke piutang ragu-ragu.

Rekening listrik yang telah jatuh tempo selama empat bulan atau lebih menjadi nilai penyisihan terhadap piutang ragu-ragu.

- d. Rekening yang dibatalkan, terdiri dari :
 - (1) Karena perbaikan, artinya klaim dari pelanggan terhadap adanya kerusakan teknis terhadap listrik pelanggan. Terdiri dari :
 - a. Rekening baru

c. Rekening tunggakan

(2) Pembatalan / double, artinya ada rekening listrik yang double dicetak oleh pihak PLN Cabang Medan. Terdiri dari :

- a. Rekening baru
- b. Rekening berjalan
- c. Rekening tunggakan

- e. Dipindahkan (cicilan), merupakan piutang listrik yang atas persetujuan perusahaan untuk dicicil pembayarannya dalam beberapa tahap, sehingga akan meringankan beban bagi pelanggan.
- f. Perubahan kode golongan, artinya adanya perubahan kode golongan terhadap pelanggan yang misalnya, dulu golongan R1 untuk golongan rumah tangga menjadi golongan R3 untuk golongan jenis usaha.
- g. Koreksi opname fisik, check lapangan langsung yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap jumlah beban pemakaian listrik pelanggan.

3. Kolom Penambahan

- a. Rekening baru
- b. Rekening susulan
- c. Rekening perbaikan, terdiri dari :

- 1. Rekening baru
- 2. Rekening berjalan
- 3. Rekening tunggakan

- d. Pemindah bukuan dari satuan lain, terdiri dari :

- 1. Rekening baru
- 2. Rekening berjalan

3. Rekening tunggakan

- e. Koreksi opname fisik
- f. Perubahan kode golongan, terdiri dari :
 - 1. Rekening baru
 - 2. Rekening berjalan
 - 3. Rekening tunggakan
- g. Dipindahkan dari Piutang ragu-ragu

4. Saldo Akhir

- a. Rekening baru,
- b. Rekening tunggakan
 - (1) Dilegalisasi
 - (2) Tidak dilegalisasi

5. Persentasi terdiri dari :

- a. Saldo awal (1) terhadap saldo akhir tahun
- b. Saldo akhir (4) terhadap saldo akhir tahun
- c. Ratio piutang saldo akhir (4) terhadap rekening baru

6. Umur Piutang saldo akhir { (4) rekening baru } x 30 hari

Berikut ini adalah data laporan piutang listrik PT. PLN (Persero) Wilayah II

Sumatera Utara Cabang Medan untuk periode bulan Oktober sampai Desember 2001

adalah :

Irma Syafrianti - Akuntansi Piutang Rekening Listrik pada

Document Accepted 4/4/24

Imma Syafrianti - Akuntansi Piutang Listrik pada...													
No	URAIAN	SUMUT (100 : 604 : 101)		ABRI (100 : 604 : 102)		NON ABRI (100 : 604 : 103)		PEMDA (100 : 604 : 104)		BUMN (100 : 604 : 104)		Jumlah	
		LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
	SALDO AWAL												
	a. Rek. Berjalan	602.092	64.514.404.659	237	26.433.130	397	759.367.455	4.100	3.443.260.845	65	2.840.865.065	806.892	71.384.131.094
	b. Rek. Tunggakan												
	1. Diegalisasi			117	12.756.430							117	12.756.430
	2. Tidak Diegalisasi	26.414	611.821.680			1.569	1.547.536.225	5.514	7.294.024.200	28	1.293.081.725	33.525	13.746.463.830
		628.506	65.126.226.339	354	39.189.560	1.966	2.306.903.680	9.614	10.737.285.045	94	3.533.746.790	840.514	82.143.351.354
2	PENGURANGAN												
	a. Diskusi												
	1. Rek. Baru	15	4.585.747.090									15	4.585.747.090
	2. Rek. Berjalan	575.817	63.943.391.945			203	32.512.455	1.636	39.256.420	35	1.249.132.435	577.691	65.264.293.255
	3. Rek. Tunggakan	25.395	578.287.200			256	825.944.050	5.387	5.026.299.135	28	1.293.081.725	31.096	7.723.612.110
	b. Dipindahkan ke Kesatuan Lain												
	1. Rek. Baru	61	48.548.400	2.751	490.130.465							2.813	538.678.865
	2. Rek. Berjalan			217	26.433.130							237	26.433.130
	3. Rek. Tunggakan			117	12.756.430	28	124.437.525	12	136.098.100			157	267.292.055
	c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-Ragu												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan												
	3. Rek. Tunggakan	1.428	61.413.160					19	3.921.500			1.424	64.914.650
	d. Rekening yang dibatalkan												
	1. Karena Perbaikan												
	A. Rek. Baru												
	B. Rek. Berjalan	309	1.580.028.070									309	1.580.028.070
	C. Rek. Tunggakan												
	2. Pembatalan												
	A. Rek. Baru												
	B. Rek. Berjalan												
	C. Rek. Tunggakan												
	e. Diperhitungkan												
	1. Rek. Baru									118	253.782.320	118	253.782.320
	2. Rek. Berjalan												
	3. Rek. Tunggakan												
	f. Perubahan Kode Golongan												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan	103	66.307.060					1	71.765	1	301.660	105	66.680.505
	3. Rek. Tunggakan												
	g. Koreksi												
3	PERUBAHAN												
	a. Rekening Baru	604.218	70.121.388.835	2.920	506.199.920	396	756.390.355	4.166	3.575.738.800	190	2.808.582.585	611.890	77.768.300.495
	b. Rekening Susulan	69	10.044.900					9	7.634.775			78	17.679.675
	c. Rekening Perbaikan												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan	309	1.493.084.340									309	1.493.084.340
	3. Rek. Tunggakan												
	d. Pindah Buku dari Satuan Lain												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan												
	3. Rek. Tunggakan												
	e. Perubahan Kode Golongan												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan					103	66.333.425	1	339.655	1	7.425	105	66.680.505
	3. Rek. Tunggakan												
	f. Dipindahkan dari Piutang Ragu-Ragu												
	g. Koreksi	386	27.876.680									386	27.876.680
4	SALDO AKHIR												
	a. Rek. Berjalan	604.209	65.497.138.245	169	16.069.455	396	756.390.355	4.175	3.563.373.575	72	2.554.800.265	809.021	72.407.771.895
	b. Rek. Tunggakan	26.172	417.761.904			257	793.186.425	2.464	3.404.272.315	31	1.391.238.335	28.964	6.006.460.979
	c. Rek. Tunggakan												
	1. Diegalisasi												
	2. Tidak Diegalisasi					1.255	597.154.650	65	2.134.125.455			1.351	2.731.280.115
						1.945	2.126.733.430	6.735	9.121.771.325	103	3.545.038.500	849.206	81.145.512.989
UNIVERSITAS MEDAN AREA													
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang													
1. Dianggap Mengutip Sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber													
2. Dengan Salvo Hak (44), Basmala, B													

Tabel 10
PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan
Listrik Bulan Desember 2001

No.	URAIAN	UMUM (100 : 604 : 101)		ABRI (100 : 604 : 102)		NON ABRI (100 : 604 : 103)		PEMOA (100 : 604 : 104)		BUMN (100 : 604 : 104)		Jumlah	
		LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
	SALDO AWAL												
	a. Rek. Berjalan	604.209	65.497.138.245	169	16.069.455	396	756.390.355	4.175	3.583.373.575	72	2.554.900.285	609.021	72.407.771.895
	b. Rek. Tunggakan												
	1. Dilegalsasi												
	2. Tidak Dilegalsasi	26.172	417.761.109			1.552	1.390.343.075	2.550	5.538.397.760	31	1.391.238.335	30.315	8.737.740.299
	Jumlah	630.381	65.914.899.354	169	16.069.455	1.543	1.146.733.430	6.725	9.121.771.355	103	3.946.138.620	639.336	81.145.512.194
1	PENGURANGAN												
	a. Ditungkasi :												
	1. Rek. Baru	113	2.451.366.920									113	2.451.366.920
	2. Rek. Berjalan	585.882	64.814.784.301			149	98.965.360	2.416	246.115.240	14	1.163.235.070	588.461	66.323.099.371
	3. Rek. Tunggakan	25.884	415.324.714			270	416.304.690	2.560	5.538.397.760	31	1.391.238.335	28.745	7.761.285.519
	b. Dipindahkan ke Kesatuan Lain :												
	1. Rek. Baru	62	47.723.230	2.920	479.545.865							2.982	527.669.095
	2. Rek. Berjalan			173	49.161.145			12	128.699.130			185	177.860.275
	3. Rek. Tunggakan												
	c. Dipindahkan ke Piutang Ragu-Ragu :												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan												
	3. Rek. Tunggakan	585	29.585.170			12	9.949.385			1	12.727.900	602	52.286.455
	d. Rekening yang dibatalkan :												
	1. Karena Perbaikan												
	A. Rek. Baru												
	B. Rek. Berjalan	250	5.335.574.730									250	5.335.574.730
	C. Rek. Tunggakan												
	A. Rek. Baru												
	B. Rek. Berjalan												
	C. Rek. Tunggakan												
	2. Pembatalan												
	e. Diperhitungkan :												
	1. Rek. Baru									127	191.275.445	127	191.275.445
	2. Rek. Berjalan												
	3. Rek. Tunggakan												
	f. Perubahan Kode Golongan :												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan	18	111.706.290	2	6.105.200			1	82.085	1	310.060	20	118.203.435
	3. Rek. Tunggakan												
	g. Koreksi												
	Jumlah	612.796	73.206.059.355	3.095	535.212.210	431	525.219.435	4.989	5.913.294.235	174	2.758.739.810	81.435	82.306.331.845
3	PENAMBAHAN												
	a. Rekening Baru	606.755	65.036.975.955	2.920	479.545.865	396	693.265.680	4.170	3.528.440.100	191	2.703.101.150	614.432	72.441.728.950
	b. Rekening Susulan	84	5.127.120					20	21.334.700			104	25.461.820
	c. Rekening Perbaikan												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan	250	5.184.467.190			12	12.442.535			1	12.727.900	263	5.209.637.625
	3. Rek. Tunggakan												
	d. Pemindah Buku dari Saluran Lain :												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan												
	3. Rek. Tunggakan												
	e. Perubahan Kode Golongan												
	1. Rek. Baru												
	2. Rek. Berjalan			6	38.196.590	11	66.145.095	2	6.749.225	1	7.425	20	112.098.435
	3. Rek. Tunggakan												
	f. Dipindahkan dari Piutang Ragu-Ragu												
	g. Koreksi	31	27.151.980									31	27.151.980
	Jumlah	607.120	70.253.722.245	2.926	519.142.535	418	771.853.510	4.192	3.596.524.025	193	2.710.536.475	614.650	72.617.078.810
4	SALDO AKHIR												
	a. Rek. Berjalan	606.664	62.540.012.925			396	693.265.880	4.190	3.549.774.800	64	2.511.225.705	611.314	69.257.879.310
	b. Rek. Tunggakan	18.311	419.540.114			258	726.653.240	1.745	3.215.226.345	56	1.391.232.560	20.375	5.752.092.259
	c. Rek. Tunggakan												
	1. Dilegalsasi												
	2. Tidak Dilegalsasi					1.262	974.038.385					1.262	974.038.385
	Jumlah	624.975	62.959.553.039			1.620	2.793.351.365	5.935	6.765.001.145	120	3.902.458.265	631.689	75.009.971.594
5	Saldo Akhir (4) terhadap saldo akhir tahun												
6	Saldo Akhir (4) terhadap Rekening BARU	102,99	56,80			468,69	345,23	141,72	190,58	63,87	144,39	103,00	104,91
7	Saldo Akhir (4) terhadap Rekening BARU					146,67	103,57	42,52	57,17	19,18	43,32	30,90	31,4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 4/4/24

Prosedur Piutang

Prosedur piutang yang dilakukan PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan untuk prosedur penagihan piutang adalah dengan cara :

1. Umum

- a. Melakukan sendiri dengan membuka loket-loket pembayaran atau payment point pada ranting-ranting dan rayon-rayon di jajaran PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan.
- b. Kerjasama pada bank-bank dan koperasi untuk membuka loket-loket pembayaran.

2. Khusus

- a. Memberikan kuasa kepada suatu badan penagih

◆ Instansi Pemerintah

Umumnya rekening instansi pemerintah tidak dapat dibayar seketika pada saat pengajuan tagihan, melainkan memerlukan waktu untuk mengadakan proses administrasi penyediaan dana, penelitian pemakaian, penelitian kelengkapan bukti penagihan dan sebagainya. Kemudian baru instansi pemerintah tersebut mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang SPMU dan kemudian dicairkan di kantor kas pemerintah.

◆ Daerah-daerah tertentu

Pembayaran di daerah terpencil kadangkala diserahkan kepada badan penagih agar mudah pengumpulan piutang rekening listrik dan daerah-

daerah yang telah disepakati kerjasamanya dengan badan penagih untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan.

b. Sistem pembayaran terpusat

Sistem ini diberlakukan kepada Departemen Hankam / ABRI dengan adanya rekening tunggakan yang dilegalisasi. Pembayaran rekening ini dilakukan langsung ke PT. PLN (Persero) Pusat melalui Departemen Keuangan di Jakarta.

D. Penilaian Piutang

Dalam penilaian piutang pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan dilakukan dengan mengelompokkan piutang (rekening listrik) menurut umur dari masing-masing rekening listrik tersebut dengan menggunakan metode daftar umur piutang. Pada daftar umur piutang dikelompokkan menjadi :

- Telah jatuh tempo s/d 3 bulan
- Telah jatuh tempo 3 bulan s/d 1 tahun
- Diatas 1 tahun

Data umur piutang yang berhasil diperoleh menunjukkan bahwa pada perusahaan ini terdapat piutang yang tertunggak atau piutang yang telah jatuh tempo dan piutang yang diragukan dapat dibayar oleh pelanggan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 11
PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan
PIUTANG LANGGANAN BERDASARKAN UMUR
PER 31 DESEMBER 2001

(Rupiah)

Langganan	Jumlah	Rekening Baru	Tunggakan Rekening		
			s/d 3 Bulan	2/3 Bln. S/d 1 tahun	Diatas 1 Tahun
1	2 = 3 + 4 + 5 + 6	3	4	5	6
UMUM	71.047.636.278	65.088.303.946	5.959.332.332	-	-
ABRI	-	-	-	-	-
Non ABRI	2.386.356.770	1.147.836.470	1.238.520.300	-	-
Pemerintah Daerah	7.566.621.305	6.146.038.890	1.420.582.415	-	-
BUMN	4.242.593.700	4.233.655.860	8.937.840	-	-
Jumlah Piutang Langganan	85.243.208.053	76.615.835.166	8.627.372.887	-	-
Piutang Ragu-Ragu	2.293.422.052	-	-	31.749.085	2.261.672.967
	87.536.630.105	76.615.835.166	8.627.372.887	31.749.085	2.261.672.967

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

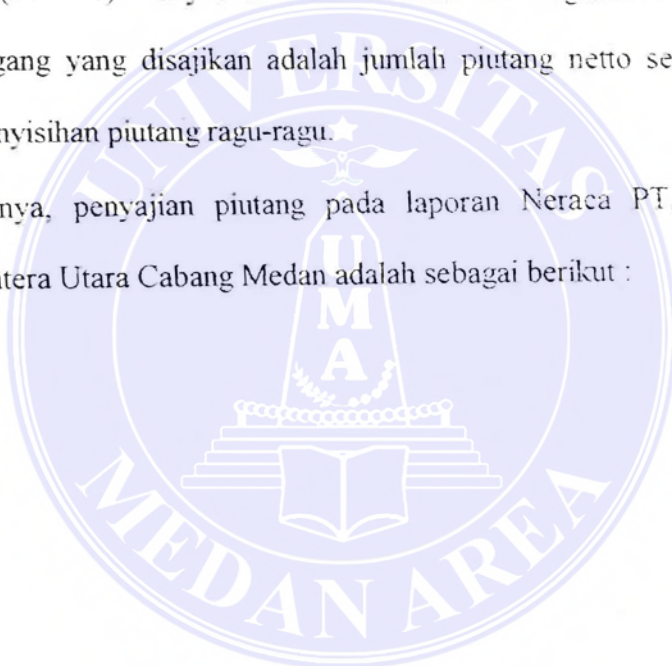
Document Accepted 4/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/4/24

E. Penyajian Piutang

Laporan keuangan pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan ini meliputi Laporan Neraca, Laporan Laba-Rugi, dan Laporan Laba Ditahan yang disajikan setiap bulannya untuk Kepala Cabang sebagai alat pengukur keberhasilan dan pengambilan kebijaksanaan perusahaan dimasa mendatang. Dari Laporan Neraca PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan dapat dilihat bahwa piutang dagang yang disajikan adalah jumlah piutang netto sesudah, tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

Untuk lebih jelasnya, penyajian piutang pada laporan Neraca PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara Cabang Medan adalah sebagai berikut :



Tabel 12
PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan

Irma Syafrianti - Akuntansi Piutang Rekening Listrik pada....

NERACA
PER 31 DESEMBER 2001 DAN 2002

KETERANGAN	Catatan	31 Desember 2001	31 Desember 2000	KETERANGAN	Catatan	31 Desember 2001	31 Desember 2000
AKTIVA	1	183.770.026.050	174.908.222.681	EKUITAS DAN KEWAJIBAN			
AKTIVA TETAP (NETTO)		300.216.338.809	278.004.498.588	EKUITAS	6	746.457.090.880	592.428.600.383
Aktiva Tetap (Bruto)		(116.446.312.749)	(103.096.275.907)	Modal Saham		-	-
Akumulasi Penyusutan	2	9.998.809.505	5.028.777.377	Tambahan Modal		746.457.090.880	592.428.600.383
PEKERJAAN DALAM PELAKSANAAN				Saldo Laba	7	(612.228.242.142)	(466.239.854.071)
PENYERTAAN	3			AKUN ANTAR SATUAN ADMINISTRASI	8	85.115.986.557	77.521.671.463
AKTIVA LAIN - LAIN	4	1.925.583.583	1.339.347.806	PENDAPATAN DITANGGUHKAN			
Aktiva Tidak Beroperasi	4.1	-	-	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	9	51.102.488.779	51.659.635.784
Piutang Lain-Lain (Jk. Panjang)	4.2	1.925.583.583	1.287.686.793	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
- Pihak Ketiga		-	-	Pinjaman Jangka Panjang	9.1	-	-
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		1.925.583.583	1.287.686.793	- Pihak Ketiga		-	-
Biaya Yang Ditangguhkan	4.3	-	-	Utang Bank		-	-
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Panjang)	4.4	-	51.661.013	Utang Obligasi		-	-
- Pihak Ketiga		-	51.661.013	- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	9.2	-	-
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-	Penerusan Pinjaman		-	-
DANA PELUNASAN OBLIGASI		-	-	Utang Kepada Pemerintah		-	-
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		-	-	Utang Bank	9.3	-	-
AKTIVA LANCAR	5	92.567.957.662	80.416.326.854	Utang Lain - Lain (Jk. Panjang)		-	-
Kas dan Setara Kas	5.1	145.116.084	7.967.522.425	- Pihak Ketiga		-	-
Investasi Sementara	5.2	-	-	- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
Piutang Usaha (Netto)	5.3	85.500.052.695	70.306.199.053	Uang Jaminan Lagganan	9.4	61.102.488.779	51.659.635.784
- Pihak Ketiga (Bruto)		83.371.046.269	69.362.420.234	Uang Biaya Proyek	9.5	-	-
Penyisihan (Pihak Ketiga) (i)		(2.011.277.042)	(1.585.693.887)	Uang Promes	9.6	-	-
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bruto)		81.359.769.227	67.776.726.347	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10	7.815.352.736	6.322.621.159
Penyisihan (Hubungan Istimewa) (i)		4.242.593.700	2.578.083.420	Utang Usaha	10.1	228.872.679	576.117.559
Persediaan (Netto)	5.4	836.412.883	1.201.885.269	- Pihak Ketiga		228.872.679	576.117.559
- Persediaan (Bruto)		846.715.107	1.213.729.611	- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	10.2	-	15.749.177
- Penyisihan		(10.302.224)	(11.844.342)	Utang Dana Pensiun	10.3	276.622.687	408.560.224
Uang Muka Pajak	5.5	-	-	Utang Pajak	10.4	6.798.694.081	4.448.681.786
Piutang Lain-Lain (Jangka Pendek)	5.6	154.780.457	253.206.912	Utang Lain - Lain		5.613.499.951	4.448.681.786
- Pihak Ketiga		75.345.000	17.308.000	- Pihak Ketiga		185.194.130	-
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		79.435.457	235.898.912	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	10.5	509.163.289	873.512.413
Biaya Yang Dibayar Dimuka & Uang Muka (Jk. Pendek)	5.7	931.595.543	687.131.95	- Pihak Ketiga		209.691.965	439.575.342
- Pihak Ketiga		-	373.9885	- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	10.6	299.471.324	433.937.071
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		931.595.543	623.773.310	Kewajiban Jangka Panjang Jarak Tempo		-	-
PERJUANGAN AKTIVA		261.692.676.810	261.692.674.718	- Pihak Ketiga		-	-
PERJUANGAN PASIVA		261.692.676.810	261.692.674.718	Utang Bank		-	-
				Utang Obligasi		-	-
				- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		-	-
				Penerusan Pinjaman		-	-
				Utang Kepada Pemerintah		-	-
				Utang Bank		-	-
				JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		288.262.676.810	261.692.674.718

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan dan pembaca skripsi ini.

A. kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi piutang pada perusahaan secara umum sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perusahaan membuat pengelompokan piutang menjadi tiga golongan yaitu :
 - Piutang dagang
Piutang ini diklasifikasikan lagi menjadi : Umum, ABRI, Non ABRI, Pemda dan BUMN/BUMD
 - Piutang karyawan.
 - Piutang bunga (denda).
2. Setiap akhir bulan perusahaan secara rutin membuat laporan piutang listrik untuk mengetahui dan memantau piutang yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, namun perusahaan menjadikan piutang ragu-ragu berdasarkan piutawng yang telah jatuh tempo (tunggak) tiga bulan dan lebih. Walaupun secara keseluruhan dinilai baik, akan tetapi akuntansi piutang pada PT. PLN (Persero)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 4/4/24

Wilayah II Sumut Cabang Medan masih terdapat beberapa kelemahan yaitu penilaian piutang dalam hal penaksiran piutang dagang ragu – ragu memakai metode langsung dari nilai rekening listrik yang ditunggak oleh pelanggan.

3. Dalam menentukan nilai penyisihan piutang ragu-ragu perusahaan mengambil dari persentase piutang yang tidak tertagih di masa yang lalu.
4. Penyajian piutang pada neraca sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum yaitu jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi serta kesimpulan di atas mengenai akuntansi piutang rekening listrik pada PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumut Cabang Medan, maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan perusahaan untuk mengatasi masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk selanjutnya sebaiknya perusahaan menyajikan taksiran umur piutang sekaligus persentase dari penyisihan piutang ragu – ragu tersebut dan membuat jurnal penyesuaian untuk taksiran penyisihan piutang ragu – ragu.
2. Dalam menentukan piutang yang tidak tertagih atau ragu – ragu sebaiknya perusahaan tidak langsung mengambilnya dari piutang yang tertunggak antara tiga bulan keatas melainkan melalui persentase pengalaman tahun sebelumnya.

3. Untuk memudahkan perusahaan memperoleh informasi mengenai jumlah piutang maka sebaiknya penyajian piutang pada neraca dipisahkan antara piutang dagang, piutang karyawan dan piutang bunga atau denda.



DAFTAR PUSTAKA

- Philip E. Fess, C. Rollin Niswonger, and Carl S. Warren, Accounting Principles 16th Edition, Terjemahan Drs. A.K. Hyginus Ruswinarto, Herman Wibowo, Jilid Satu, Edisi Enambelas, Cetakan Kesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997.
- Hadibroto, H.S. dan Witarsa, Oemar, Sistem Pengawasan Intern (System of Internal Control), Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Na'im, Ainum, Akuntansi Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Pertama BPH, Yogyakarta, 1993.
- Jay M. Smith, and K. Fred Skousen, Intermediate Accounting, Comprehensive Volume 9th Edition, Alih Bahasa Tim Penerjemah Penerbit Erlangga, Volume Comprehensif, Jilid Satu, Edisi Sembilan, Cetakan Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1995.
- S.R., Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Buku Kesatu, Edisi Keempat, Cetakan Kedelapan, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- S. Nasution, dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Skripsi, Thesis, Disertasi Makalah, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi VIII, Tarsito, Bandung, 1995.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1994.